



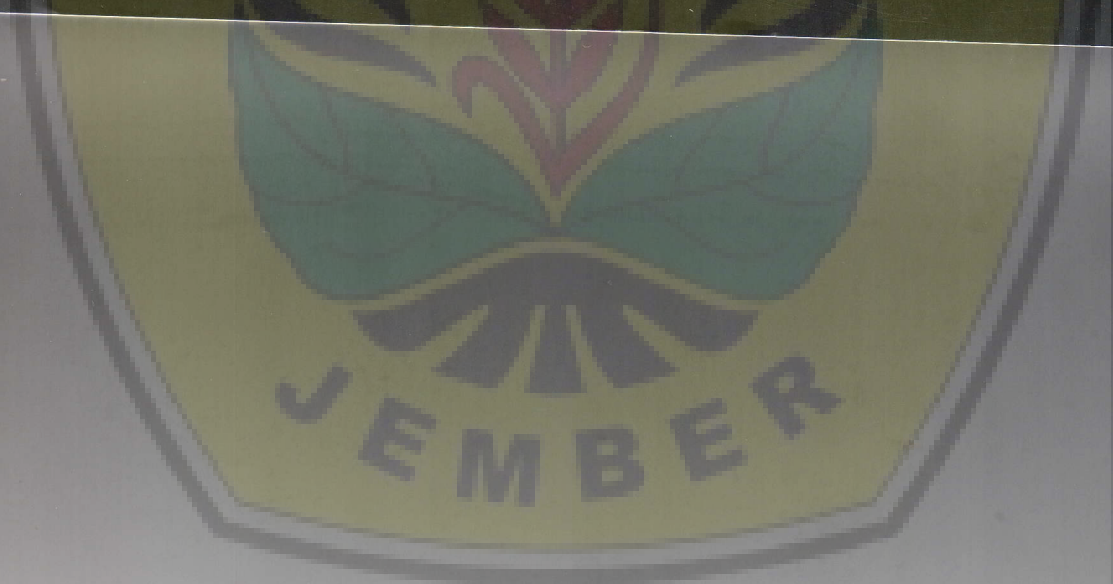
ATI  
AR-RUZ'UMEDIA

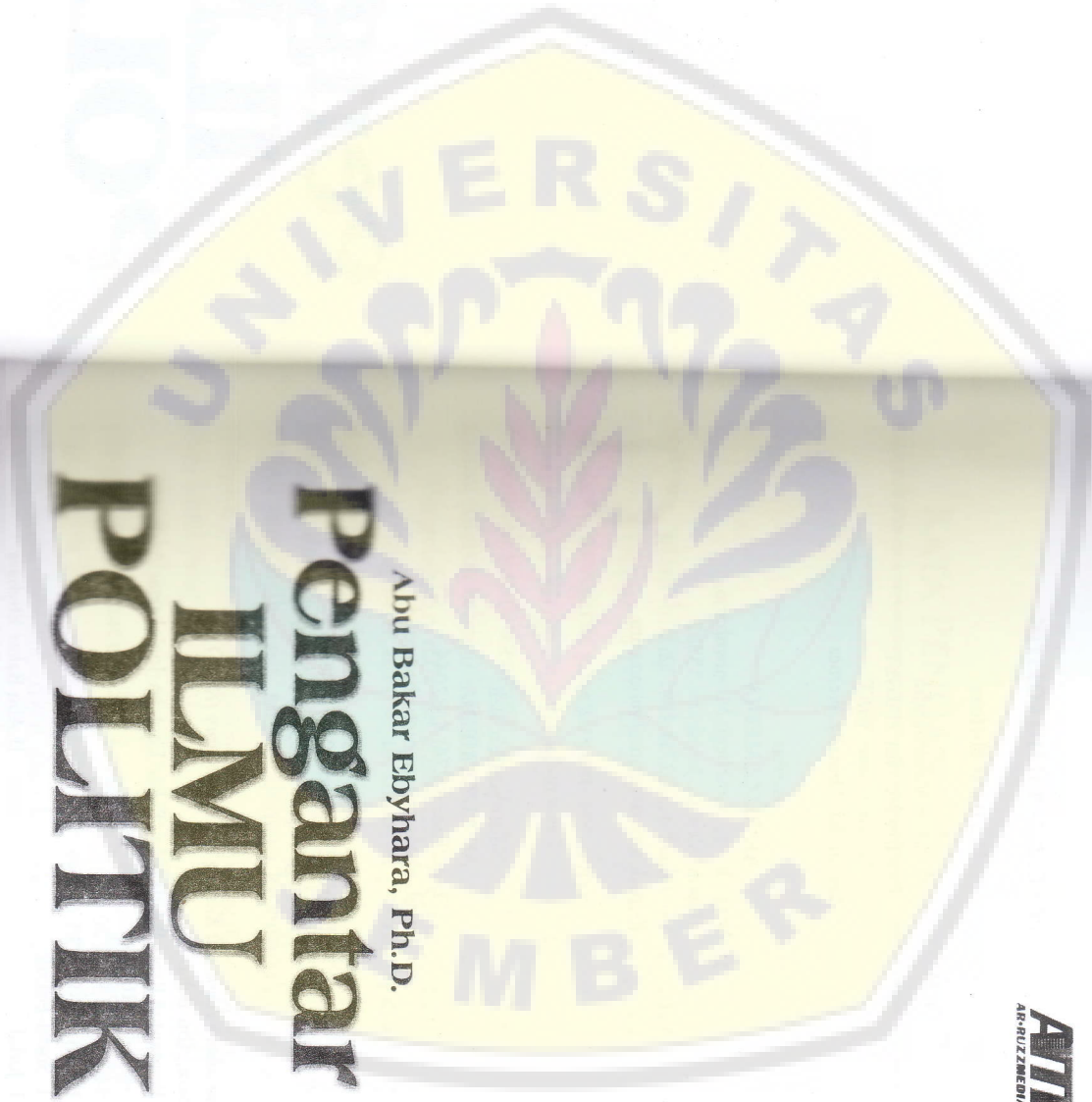
Abu Bakar Ebyhara, Ph.D.

# Pengantar ILMU POLITIK

“Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.”  
*Aristoteles*

“Negara sebagai sebuah lembaga memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah.”  
*Max Weber*







**PENGANTAR ILMU POLITIK**

Abu Bakar Ebyhara

Editor: Meita Sandra

Proofreader: Nur Hidayah

Desain Cover: Ti:AT

Desain Isi: Ahmady Averoez

Peneliti:

**AR-RUZZ MEDIA**

Jl. Angrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo,

Depok, Sleman, Jogjakarta 55282

Telp./Fax: (0274) 488132

E-mail: arruzwacana@yahoo.com

ISBN: 978-979-25-4795-5

Cetakan 1, 2010

Didistribusikan oleh:

**AR-RUZZ MEDIA**

Telp./Fax: (0274) 4332044

Email: marketingarruzz@yahoo.co.id

Perwakilan:

Jakarta: Telp./Fax: (021) 7900655

Malang: Telp. Fax: (0341) 568439

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Ebyhara, Abu Bakar

Pengantar Ilmu Politik/Abu Bakar Ebyhara-Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2010

540 hlm, 13,5 X 20 cm

ISBN: 978-979-25-4795-5

1. Sosial-Politik

I. Judul

II. Abu Bakar Ebyhara

**KATA PENGANTAR PENERBIT**

Dalam hidup sehari-hari kita berhadapan dengan fenomena politik, seperti bagaimanakah pemerintah mengatur masyarakat melalui pajak, belanja lintas, kesehatan, hingga urusan perpajakan. Ada kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memaksa. Ini adalah gejala yang harus dievaluasi sebagai kejadian atau gejala politik.

Mengetahui dan keterampilan politik sudah ada sejak jaman ada, terutama sejak muncul pemikir-pemikir yang menganalisis bagaimana masyarakat seharusnya diatur dalam kehidupan dan bagaimana seharusnya negara yang baik atau warga negara yang baik. Jadi, seiring dengan kemunculan peradaban modern, ilmu politik dalam arti luas ini dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang paling tua.

Politik berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pemerintahan, ketertarikan, dan ketertarikan. Jika kita sederhana akan melihat antara kekuasaan (*power*) dengan pengaruh (*influence*) adalah suatu keseimbangan atau konsekuensi logis. Di antara kekuasaan dan pengaturan juga demikian. Sedangkan, ketertarikan dan ketertarikan adalah akibat dan tujuan. Jadi, politik atau hal-

hal yang berkaitan dengan politik berkaitan dengan tiga hal utama: kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan kecerahan/keteraturan (*order*).

Seiring dengan perkembangan zaman dan manusia, bidang-bidang yang dikembangkan dalam ilmu politik pun menjadi berkembang. Berbagai perumusan objek kajian dan bidang-bidang yang dipelajari menunjukkan dinamika yang terus bertambah. Ilmu politik pun berkembang mengikuti perubahan manusia dan peradaban.

Buku ini merupakan pengantar menuju pemahaman ilmu politik yang lebih lanjut. Dengan dimulai dengan pengenalan ilmu politik hingga perjalanan politik Indonesia, buku ini merupakan sebuah pengantar yang lengkap terhadap ilmu politik. Akhir kata, selamat membaca dan mengenal ilmu politik.

Jogyakarta, Agustus 2010

Redaksi

## KATA PENGANTAR PENULIS

*Alhamdulillah*, puji syukur ke hadirat Yang Kuasa, akhirnya buku ini selesai penulis susun dan dapat dipublikasikan.

Buku ini merupakan rencana yang cukup lama yang sempat terbengkalai akibat kesibukan penulis dalam mengajar dan melakukan aktivitas sebagai pengajar di beberapa kampus, termasuk di salah satu kampus di Negeri Jiran.

Dengan terbintnya karya ini, janji penulis untuk mengumpul-kan apa yang pernah penulis tulis dapat terkabulkan. Dengan bantuan salah seorang mantan mahasiswa dan teman diskusi, Ridwan Soyomukti, penyusunan buku ini dapat terlaksana dengan baik. Atas waktu yang ia luangkan untuk membantu mengedit dan memperbaiki beberapa bagian, terutama mengenai teori politik *meritisme* dan perubahan sosial, buku ini juga menjadi kaya jika dibarengi sebagai sebuah buku pengantar—untuk memahami ilmu dan gejala politik dalam kehidupan ini.

Nurani juga pernah menjadi rekan kerja penulis ketika ia penulis ajak untuk menjadi peneliti tamu (*yellow researcher*) di IICF (International Center for Islam and Pluralism) Jakarta, tiga-tiga sekitar 5 tahun lalu. Kami sering berdiskusi tentang



banyak hal, terutama tentang masalah ilmu politik dan wacana sosial lainnya. Dengan terbitnya buku ini, tanda persahabatan kami tampaknya masing berlangsung lama. Teknologi informasi komunikasi, terutama jejaring sosial *Facebook*, memungkinkan diskusi yang kami lakukan kian intensif, mengingat posisi penulis yang lebih banyak berada di Negeri Jiran dalam rangka mengaji di sana. Harus diakui bahwa karya ini merupakan hasil rayuan Nurani Soyomukti kepada penulis, menantang penulis untuk membuka kembali berkas-berkas tulisan yang ada di laptop dan bahkan hanya ada dalam versi *printed*.

Buku ini merupakan hasil kumpulan beberapa tulisan, bahan kuliah, dan bacaan-bacaan yang diberikan selama ini. Ia tidak dimaksudkan sebagai sebuah kajian komprehensif tentang ilmu politik, tapi lebih sebagai pengantar dan untuk memudahkan para mahasiswa dan peminat ilmu politik memasuki belantara kajian ilmu politik domestik maupun global. Untuk keperluan ini, penulis mencoba sebisa mungkin untuk memasukkan topik-topik dalam ilmu politik yang relevan walaupun tentu saja ada yang luput dari cakupan buku ini. Topik-topik telah dipilih sesuai dengan keperluan yang umum diperlukan mahasiswa dalam memahami masalah-masalah politik, terutama di Indonesia.

Keperluan mahasiswa dan peminat ilmu politik terhadap buku ilmu politik beragam. Salah satu yang paling mencolok adalah konteks masyarakat kita dewasa ini. Politik sering dipahami sebagai sesuatu yang kotor atau trik untuk memenangkan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif dengan berbagai cara. Buku ini ingin memperkenalkan makna politik yang sebenarnya. Politik bukanlah sekadar praktik untuk memenangkan kuasa dengan apa saja cara. Politik juga menyangkut moral dan tanggung jawab

terhadap masyarakat. Politik juga menyangkut legitimasi dan sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Tentang moral dan cara memerintah ini, penulis berusaha menunjukkan sejak awal bahwa selain pemikiran dan akar politik dari Barat, terdapat juga pemikiran dari Timur, terutama dari China dan India dalam mengatur kehidupan politik. Teori-teori negara pun demikian, tidak hanya di Barat yang mempunyai pemahaman tentang negara. Timur yang diwakili oleh negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan memiliki permasalahan dan artinya pemahaman sendiri tentang negara berdasarkan perkembangan sejarah dan pengalaman politik mereka.

Dalam bab "Teori Demokrasi", penulis berusaha menjelaskan pentingnya pengalaman tiap negara dalam menentukan sistem politiknya. Negara-negara Barat mempunyai pengalaman yang panjang dalam menerapkan demokrasi sehingga menjadi bentuk yang relatif baku seperti sekarang. Di masa lampau, banyak negara-negara yang dikenal dengan negara paling demokratis sekarang menjadi sangat diskriminatif dalam menentukan siapa yang berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Kaum perempuan dan orang kulit hitam di Amerika, misalnya, baru mulai diakui hak-haknya pada paro kedua abad 20.

Jika demokrasi di Dunia Ketiga saat ini sering disorot sebagai belum sempurna, ini karena umumnya banyak ahli politik mengukurnya dari pengalaman dan bentuk model demokrasi liberal Barat yang sudah jadi sekarang. Ini bukan berarti bahwa pemerintahan negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka ini lebih mendas rakyatnya dan menutup semua katup partisipasi mereka. Yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa negara-negara ini terada dalam perubahan yang terus-menerus. Rezim-rezim dikawatirkan dan ororiter barangkali akan segera tumbang dan



politisi di Indonesia semakin terjebak pada rutinitas politik sebagai alat mengejar kekuasaan dan uang. Mereka kehilangan inovasi dan inspirasi. Para politisi menjadi tidak kreatif dan kehilangan imajinasi. Buku ini adalah salah satu yang mudah mudahan bisa mengatasi kesulitan itu.

Akhir kata, tak lengkap kalau tidak disebutkan mereka yang berjasa terhadap buku ini. Buku ini tidak terwujud tanpa bantuan dan saran-saran dari rekan-rekan. Oleh karena itulah, penulis ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada Nurani Soyomukti, yang tak henti-henti mendorong agar karya ini diselesaikan dan juga terima kasih atas pandangan-pandangannya yang tajam untuk bagian-bagian marxisme dan sosialisme, termasuk juga tentang munculnya gerakan-gerakan kiri dalam politik dunia maupun lokal. Juga, kepada keluarga penulis yang selalu mendorong munculnya sebuah karya dan tulisan, penulis ucapkan terima kasih.

Jember, Mei 2010

ABU BAKAR EBIHARA

## DAFTAR ISI

II	DAFTAR PENGANTAR PENERBIT	5
III	DAFTAR ISI	7
I	DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN ILMU POLITIK	13
A	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK	17
B	PENCERTIAN ILMU POLITIK	35
C	OBJEK KAJIAN ILMU POLITIK	44
D	BIDANG-BIDANG ILMU POLITIK	45
E	METODE ILMU POLITIK	48
II	<b>HUBUNGAN ILMU POLITIK DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA</b>	59
A	FILSAFAT	62
B	SEJARAH	64
C	ILMU EKONOMI	72
D	SOSIOLOGI	74
E	ANTROPOLOGI	76
F	PSIKOLOGI	80
G	ILMU HUKUM	83
H	ILMU BUMI DAN GEOGRAFI	84



<b>III PEMIKIRAN-PEMIKIRAN POLITIK PALING BERPENGARUH</b> .....	87	<b>VIII TEORI POLITIK MARXISME</b> .....	371
A. YUNANI KUNO.....	92	A. SURWALITAS TEORI POLITIK MARXISME.....	371
B. PEMIKIRAN POLITIK ROMAWI KUNO.....	111	B. FILSAFAT MARXISME.....	381
C. PEMIKIRAN POLITIK ZAMAN PERTENGHAHAN.....	118	C. TEORI MARXIS TENTANG NEGARA.....	409
D. PEMIKIRAN POLITIK MODERN.....	132		
<b>IV KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN: DARI "TRIAS POLITICA" HINGGA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH</b> .....	171	<b>IX TEORI PERUBAHAN POLITIK: REFORMASI ATAU REVOLUSI</b> .....	447
A. PENGERTIAN KEKUASAAN.....	171	A. PERSPEKTIF PERUBAHAN.....	447
B. "TRIAS POLITICA" DAN PEMISAHAN KEKUASAAN.....	186	B. YANG BERKEPENTINGAN PADA PERUBAHAN.....	464
C. TRIAS POLITICA DI INDONESIA.....	209	C. KAUM MUDA DAN PERUBAHAN.....	471
D. PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA VERTIKAL.....	210	D. PERUBAHAN POLITIK INDONESIA PASCA-ORDE BARU.....	492
E. FEDERALISME DI MALAYSIA.....	213		
F. WACANA FEDERALISME DI INDONESIA.....	215	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	505
G. BEREBUT KEKUASAAN: PARTAI POLITIK DAN PEMILU.....	220	<b>DAFTAR PENULIS</b> .....	521
			533
<b>V TEORI NEGARA</b> .....	229		
A. DEFINISI NEGARA.....	231		
B. TEORI TERBENTUKNYA NEGARA.....	236		
C. TUJUAN NEGARA.....	239		
D. TIPE DAN BENTUK NEGARA.....	247		
E. GLOBALISASI DAN MITOS NEGARA MELEMAH.....	249		
<b>VI TEORI DEMOKRASI</b> .....	261		
A. MUNCULNYA IDE DEMOKRASI.....	261		
B. PERKEMBANGAN IDE DEMOKRASI.....	272		
C. EKSPANSI DEMOKRASI LIBERAL DAN RESPONS DUNIA KETIGA.....	298		
D. DEMOKRASI DI INDONESIA.....	322		



I

## DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM ILMU POLITIK

### A SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

sebelum menjadi disiplin ilmu tersendiri, ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang terbilang cukup tua. Pandangan ini tentu muncul untuk mengatakan ilmu dan pengetahuan politik secara umum atau dalam pengertiannya yang luas. Artinya, jika politik dipahami sebagai cara untuk menggapai sesuatu yang membuat relasi kekuasaan antara manusia dan alam maupun antara sesama manusia terjadi.

Tak salah jika manusia sepanjang kehidupan ini disebut sebagai "zoon politicon" atau makhluk politik. Disebut demikian karena selalu ada relasi kuasa dalam hubungan antar-sesama manusia, baik sejak zaman kuno yang diwarnai perang antar-klan, dominasi pemimpin dalam sebuah klan atau suku, hingga tercapainya suatu komunitas yang lebih modern seperti sekarang.



Kriteria kualitas penelitian: Objektivitas, reliabilitas, dan validitas.	Kriteria Kualitas penelitian ilmu sejarah: Sejah mana peneliti memperhatikan konteks historis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.	Kriteria kualitas penelitian: Aurentritas, reflektivitas, sejah mana temuan merupakan refleksi autentik realitas dihayati oleh para pelaku penelitian.
--	---	--

Tabel 1. Paradigma klasik, kritis, dan konstruktif



II

HUBUNGAN ILMU POLITIK DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA

Ilmu politik jelas memerlukan ilmu-ilmu lainnya untuk mengembangkan diri, baik untuk mempersiapkan analisis maupun memperluas objek kajiannya. Ini berarti bahwa sejak zaman kuno hingga zaman sekarang, ilmu politik dipelajari oleh disiplin ilmu lainnya, terutama ilmu-ilmu sosial. Plato, misalnya, adalah pemikir yang tertarik memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur keluarga dan sifat-sifat pendidikan, sejarah hal-hal itu sesuai dengan sifat-sifat dasar negara yang ia lihat.

Aristoteles juga sangat khawatir tentang adanya pembagian kekuasaan dan status dalam masyarakat, sebagaimana dalam tiap-tiap teori politik yang mereka punyai. Karl Marx memanfaatkan pengetahuan sejarah dan ekonominya untuk melihat relasi politik dalam masyarakat dan menganalisis dinamika politik berdasarkan perkembangan teknologi dan struktur kelas sosial yang merupakan kajian dari sosiologi.



III

PEMILIRAN-PEMILIRAN POLITIK  
PALING BERPENGARUH

Pemikiran politik merupakan bidang kajian ilmu politik yang cukup penting. Kajian pemikiran politik menitikberatkan pada penyelidikan pemikiran-pemikiran politik, filsaf politik, maupun kelompok sosial yang berpengaruh melalui ide-ide politiknya. Menurut A. Rahman (1990), pemikiran politik berkaitan erat dengan sejarah dan kondisi, dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai, norma, dan idealisme politik.<sup>35</sup>

Pemikiran politik terdiri dari elemen-elemen ide, obsesi, dan intelektual dan sosialisasi politik, yang merupakan konsep-konsep lingkungan sosial mengenai masalah negara, kekuasaan, dan kekuasaan. Obsesi dapat dipahami sebagai keinginan yang mencerminkan di benak seorang pemikir sepanjang

A. Rahman Zainuddin. "Pemikiran Politik", dalam *Jurnal Ilmu Politik* (Jember: AFP-IPJ-Gramedia, 1990), hlm. 3.



negara. Ia harus lebur dalam kesatuan negara. Jadi, individu tak mungkin bisa jadi oposisi terhadap dengan negara. Alasannya, perlu diingat bahwa bukan berarti Hegel tidak mengabdikan eksistensi kebebasan individu. Ia mengakuinya.<sup>83</sup>

Harus diakui bahwa pandangan Hegel memiliki banyak kelemahan. Banyak reaksi yang bermunculan terhadap pemikirannya. Di Jerman pemikiran Hegel memunculkan dua interpretasi:<sup>84</sup> Pertama, dari Hegelian Kanan yang menafsirkan kesimpulan bahwa negara modern merupakan pengejawantahan rasionalitas yang harus diakui, diterima, dan ditaati. Kedua, dari Hegelian Kiri, yang menekankan segi kritis dari filsafat Hegel yang kemudian justru digunakan untuk menyerang cacat teori dan pemikiran Hegel di berbagai bidang, mulai filsafat, politik hingga budaya.

Pada penafsiran yang kedua itulah kita mengenal nama Karl Marx yang merupakan salah seorang pemikir politik yang tak dapat diabaikan. Ia merupakan tokoh yang pemikirannya berada pada posisi yang bertentangan secara jelas dengan Hegel. Marx awalnya adalah murid Hegel, lalu muncul sebagai pemikir politik yang menjadi aliran tersendiri, aliran dan pemikirannya yang dalam sejarah terbukti memiliki pengaruh yang luar biasa besar dan kuat. Pemikiran politik Marx (isme) akan penulis bahas dalam bab tersendiri karena itu menyangkut berbagai hal yang dibahas, mulai dari teori perubahan sosial, teori negara, gerakan politik.

\*\*\*

83. A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menanggapi* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 101.  
84. Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, hlm. 60.



## IV

### KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN: DARI "TRIAS POLITICA" HINGGA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

#### PERMERTIAN KEKUASAAN

Perintah adalah konsep pokok dalam ilmu politik. Kita melihat bahwa sejarah yang telah berlangsung panjang ini melibatkan individu dan kelompok yang saling berbuat kekuasaan. Perintah kekuasaan terjadi sejak manusia itu ada, dalam berbagai bentuk yang lunak, hingga konflik dahsyat dan perang yang menimbulkan korban nyawa, darah, dan air mata.

Perintah membentuk kekuasaan, hubungan menguasai antar-individu juga mengalami berbagai macam bentuk seiring dengan wilayah-wilayah geografis dan budaya manusia. Perintah merupakan suatu konsep kuantitatif (dapat dihitung) luas wilayah, siapa orang dipengaruhi, lamanya



V

## TEORI NEGARA

Negara merupakan konsep yang paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian karena di sana terdapat pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Mengapa demikian?

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah (baca: alat) masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan meniadakan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Unsur-unsur negara adalah hal-hal yang dianggap harus ada agar suatu kekuasaan dan wilayah layak disebut sebagai negara. Umumnya, negara terdiri dari empat unsur:

Wilayah  
Masyarakat





## TEORI DEMOKRASI

### MUNCULNYA IDE DEMOKRASI

Demokrasi dalam sejarah peradaban dianggap sudah mulai muncul sejak zaman Yunani Kuno. Capaian praktis dari pemikiran Demokrasi Yunani adalah munculnya apa yang disebut "negara kota (Polis)". Polis adalah bentuk demokrasi pertama Pericles dalam bukunya yang terkenal, *Funeral Oration*, menyatakan bahwa pemerintahan Athena disebut demokrasi karena administrasinya berada di tangan banyak pihak. Demikian pula ahli drama Aeschylus dengan bangga berkesimpulan bahwa tidak ada pemerintahan di Athena karena rakyat adalah pemerintah.<sup>140</sup>

Demokrasi berasal dari kata-kata Latin *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan), selalu diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Istilah *demokratia* mulai dipakai di Athena sekitar pertengahan abad ke-5 M. Istilah ini mungkin telah

<sup>140</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik...*, hlm. 37.



VII

## TEORI POLITIK MARXISME

### A SURVIVALITAS TEORI POLITIK MARXISME

Apakah yang membuat marxisme selalu relevan sebagai sebuah teori tentang sejarah, masyarakat, dan politik? Tentu saja karena analisis teoretisnya yang dapat dikatakan canggih dan radikal. Namun dalam kajian politik, marxisme memberikan analisis terhadap gejala kekuasaan, negara, dan perubahan politik. Yang lebih penting lagi, marxisme masih punya kekuatan dalam melihat gerakan dan partai politik. Sebagaimana dikemukakan Franz Hinkel-Schroder, Suseno bahwa marxisme bukan hanya teori, melainkan juga ideologi perjuangan politis<sup>232</sup> yang menyemangati sebagian besar gerakan buruh sejak akhir abad ke-19 dan dalam abad-20 menghadapi kebanyakan gerakan nasional.<sup>232</sup>

<sup>232</sup> Franz Hinkel-Schroder, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Analisis Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. xi.





## TEORI PERUBAHAN POLITIK: REFORMASI ATAU REVOLUSI

### A. PERSPEKTIF PERUBAHAN

Walaupun sesuatu yang ada di alam dan dunia ini selalu berubah. Itu adalah hukum alam, hukum material yang menyusun alam kehidupan ini. Gerak dan perubahan adalah hakikat tertinggi. Bahkan, ada filsuf yang mengatakan bahwa diam adalah bagian dari gerak. Lihat saja, dalam kurun waktu sejarah yang amat panjang, kita telah melihat berbagai macam perubahan dalam banyak hal dan di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Di antara berbagai perubahan itu, ada yang bersifat pelan dan ada yang bersifat cepat, ada yang perubahannya tidak begitu besar, tetapi juga ada perubahan yang sangat luar biasa. Tentu kadang kita tidak menyadarinya. Akan tetapi, jika kita bisa mendapatkan informasi tentang muncul dan hilangnya suatu hal-hal material yang ada dalam waktu yang panjang,

bahkan membuat budaya politik Indonesia kian memburuk. Ini jelas merupakan data bahwa reformasi lebih banyak memakan korban darah, keringat, dan air mata dibandingkan revolusi. Reformasi dan revolusi bukanlah metode-metode yang berbeda mengenai perkembangan sejarah yang bisa dipilih sesuka hati dan pentas sejarah. Masalahnya hanyalah mencerminkan kepentingan siapakah antara kedua pilihan itu.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

---

- "ALBA, Solidaritas Amerika Latin". Dalam *Pikiran Rakyat*, 15 Mei 2006.
1961. *Selected Works of Mao Tse-tung Vol IV*. Peking: Foreign Languages Press.
- Alfan. 1986. *Perikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Almond, Gabriel. 1967. "Political Theory and Political Science", dalam Ithiel de Sola Pool (ed.), *Contemporary Political Science: Toward Empirical Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Anderson, Benedict. 1988. *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anderson, Perry. 1979. *Lineages of Absolutist State*. London: Verso.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.



- Tjipiomangunkusumo 326, 331, 377, 477, 480  
 tradisionalisme 48, 49  
 transformasi 57, 163, 304, 306, 468  
 transisi 113, 133, 303, 304, 305, 306, 308, 357, 361, 362, 407, 495, 496, 497
- transplacement 305, 306  
 Trias Politca 158, 160, 187, 189, 195, 207, 209, 210, 219, 515  
 tujuan kelas 235
- U**  
 Uni Soviet 193, 222, 287, 288, 289, 302, 417, 418, 425, 429, 435, 460  
 UUD 1945 67, 209, 240, 339, 346, 348, 349, 360
- V**  
 Vasquez, Tabare 290  
 Volksraad 323, 330, 331, 332
- W**  
 W. Ebenstein 33  
 wakil rakyat 153, 190, 192, 193, 194, 195, 203, 226  
 warga negara 5, 18, 73, 94, 107, 130, 156, 160, 162, 208, 241, 263, 264, 268, 279, 280, 283, 284, 424  
 Weber, Max 233  
 wewenang 77, 82, 84, 126, 127, 181, 183, 184, 185, 190, 195, 202, 204, 206, 207, 211, 232, 233, 266, 352  
 Weydemeyer, Joseph 407  
 Wolin, Sheldon 284
- Woods, Allan 392  
 Wycliffe, John 130
- X**  
 Xenophon 20
- Y**  
 Yang Dipertuan Agung 200, 201, 202, 203, 204, 205  
 yudikatif 188, 189, 202, 207, 208, 210, 263, 264, 266, 276, 281, 305, 358  
 Yunani 18, 19, 21, 29, 60, 63, 64, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 109, 110, 111, 113, 115, 134, 160, 174, 238, 248, 261, 263, 270, 287, 304, 383, 390, 410, 515  
 Yunani Kuno 18, 21, 60, 63, 64, 92, 110, 113, 160, 172, 238, 248, 261, 383, 410, 515
- Z**  
 Zeno 110  
 zoon politicon 17, 21, 108, 248

## PROFIL PENULIS

**A**BUBAKAR EBY HARA, Ph.D. lahir di Pangkal Pinang, Indonesia, 8 Februari 1964. Meskipun saat ini masih tercatat sebagai Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fisip Universitas Jember, Jawa Timur, ia juga harus bolak-balik dari Malaysia-Indonesia karena ia adalah Senior Lecturer di Fakultas Pengajian Antarabangsa (College of Law, Government and International Studies - COLGIS, Universiti Utara Malaysia sejak 2007 hingga sekarang). Ia pernah menjadi Visiting Research Fellow at the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Jepang, pada Mei—Oktober 2006. Antara tahun 2003—2006 ia menjadi Program Officer at International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Jakarta dan sekaligus menjadi dosen tamu di (*Guest Lecturer*) di Department of International Relations, Paramadina Mulya University Jakarta, Al-Azhar University Jakarta, dan Universitas Indonesia (Nasional University) Jakarta 2001—2005.

Profesi pengajar, penulis, dan peneliti ia mulai setelah lulus dari strata 1 pada Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1987. Pada 1995, ia mendapat gelar



Master of Arts (MA) di Department of International Relations, Research School Pacific and Asian Studies (RSPAS), Australian National University (ANU), Canberra, Australia. Kemudian, ia meraih gelar Doktor (Ph.D.) di Department of International Relations, Research School Pacific and Asian Studies (RSPAS), Australian National University (ANU), Canberra, Australia pada 2000. Ia merupakan dosen yang produktif dalam melakukannya penelitian, tulisannya (opini) berkebar di berbagai koran nasional. Hasil penelitiannya diterbitkan di berbagai jurnal tingkat nasional dan internasional. Dia juga menjadi pembicara di forum-forum tingkat internasional.

Surel: ebyhara@gmail.com.

#### Partisipasi dalam Seminar:

- Pembicara dalam seminar “The Development of the ASEAN Human Rights Perspective And Its Formative Impacts on the Inclusion of Human Rights Principles in The Asean Charter” di The Third International Conference on Southeast Asia (ICONSEA), Universiti Malaya pada 8—9 Desember 2009;
- Pembicara dalam seminar “Mempererat Kembali Hubungan Serantau Malaysia-Indonesia Melalui Kerjasama Mengapai Keselamatan Alam Sekitar” di Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia 2009, 6—8 Agustus, 2009, Fakulti Sains dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur;
- Pembicara dalam seminar “Human Rights Principles in ASEAN Charter: The Reasons and Possibilities for Implementatio”, di International Conference of Human Rights and Conflict Transformation and Peace, Universitas Negeri Makassar, Hotel Sahid Makassar, 27—28 Februari 2009;
- Pembicara dalam “Malaysia-Indonesia Relations: the Fading of ‘Serumpun Identity’ and the Uncertain Future of New Collective Identity”, di International Conference on International Studies (ICIS) 2008, 4—6 Desember 2008, Institute for Diplomacy and Foreign Relations, Kuala Lumpur;
- Pembicara dalam seminar “Membina Kembali Kepemimpinan Melayu Melalui Kerjasama Serantau Malaysia-Indonesia”, di Seminar Kepemimpinan Melayu, 18—19 November 2008, Sime Darby Convention Center, Kuala Lumpur;
- Pembicara dalam seminar “Future Democratization in Indonesia”, di Workshop on 21<sup>st</sup> Century Indonesia-Challenges Ahead, 13—14 November 2008, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapura;
- Pembicara dalam seminar “State Identity Debates in the Post-Soeharto Era in Indonesia: the Contestation between Radical and Moderate Muslims/Nationalist Seculars”, di International Conference on Ethnic Relations (ICoER), 15—16 October 2008, Universiti Malaya;
- Pembicara dalam seminar “The Role of Local Wisdoms and Practices in Mitigating Conflicts in Maluku, West Sulawesi and West Kalimantan, Indonesia” di International Conference on Social Sciences and Humanities (ICoSSH) 2008, 18—20 Juni 2008, Universiti Sains Malaysia, Penang;
- Pembicara dalam seminar “2<sup>nd</sup> Meeting of the South East Asia Forum on Islam and Democracy (SEAFID)”, 12—14 Agustus 2008, di J.W. Marriot Hotel, Jakarta, diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism, Jakarta;